

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dewasa ini tengah banyak melakukan berbagai macam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Pembangunan dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek yang menerima semua kegiatan dan program dari pemerintah termasuk dalam memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Menurut Kartasasmita (dalam Jumaris, 2016:45) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan, yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pembangunan diberbagai aspek salah satunya teknologi, membuat sebuah program yang dapat memberikan banyak sekali manfaat dalam membantu mengerjakan semua pekerjaan dengan lebih cepat dan singkat, pekerjaan yang dihasilkan akan jauh lebih baik.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan lagi kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui beberapa program kegiatannya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas masyarakat yang rendah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua seksi yaitu Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dan Seksi Keswadayaan (KSWD). Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) ikut andil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, dan memiliki dua program kegiatan setiap tahunnya yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sedangkan Seksi Keswadayaan (KSWD) memiliki satu program kegiatan yaitu program Data RT /RW.

Masa pandemi Covid-19 yang muncul ditahun 2020 hingga dewasa ini, membuat beberapa program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) harus terhenti sementara waktu. Program kegiatan yang masih aktif dan masih dijalankan yaitu Sistem Informasi Posyandu *Online* (SIP Online) yang merupakan bagian program kegiatan posyandu yang dipegang langsung oleh Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM). Sistem Informasi Posyandu (SIP) sendiri merupakan catatan atau *register* untuk kader dalam mencatat rangkaian kegiatan untuk menghasilkan



informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat bagi pengelola posyandu dalam rangka mewujudkan posyandu yang mandiri. proses komunikasi agar informasi dapat tersampaikan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah program kegiatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) memerlukan adanya proses komunikasi.

Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan tertentu. Komunikasi merupakan proses penyampaian sebuah informasi, ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Buku *Dinamika Komunikasi* (Effendy 2015:5) menjelaskan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Komunikasi berfungsi mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah instansi pemerintahan. Oleh sebab itu perlu dilihat bagaimana terjadinya suatu proses ketika pesan diciptakan, ditampilkan, diinterpretasikan dan berkembang.

Pada pelaksanaan program kegiatan SIP *Online* komunikasi sangat berperan penting dalam penyampaian pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi yang baik dibutuhkan keterampilan yang baik secara tulis maupun lisan, hal ini untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Komunikasi inilah yang akan diteruskan dari Bidang Pemberdayaan (PM) melalui Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor kepada kader-kader posyandu yang berada di kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Bogor. Apabila terdapat kesalahan dalam menerima dan memberikan sebuah intruksi dan informasi, maka akan terjadi kesalahan fatal dalam siklus program kegiatan yang akan dilakukan. Program kegiatan akan menjadi terhenti dan tidak adanya *progress* yang dihasilkan, jika antara komunikator dengan komunikan tidak berkomunikasi dengan baik. Komunikasi akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan ataupun pula dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah yang dibahas dalam penyusunan laporan akhir adalah :

1. Bagaimana proses komunikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana proses komunikasi Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dalam program SIP *Online* ?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam proses komunikasi Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dalam program SIP *Online* ?

Tujuan

Berdasarkan latar belakang beserta rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan studi ini, ialah :

1. Menjelaskan bagaimana proses komunikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.



2. Menjelaskan bagaimana proses komunikasi Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dalam program SIP *Online*.
3. Menjelaskan apa saja hambatan dan solusi dalam proses komunikasi Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dalam program SIP *Online*.

METODE

Lokasi dan Waktu PKL

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan data yang diperoleh pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan terhitung 01 Maret 2021 sampai dengan 03 Mei 2021.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir adalah sebagai berikut :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada Ibu Yustikasari, S.H selaku kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM), Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dan beberapa staf lain untuk memperoleh informasi dan data yang akurat.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung atau dari pihak lain. Data ini berupa data internal dan data eksternal. Data internal yang digunakan meliputi data tentang profil perusahaan. Data eksternal yang digunakan diperoleh dari referensi buku-buku, *website*, dan sumber lain yang berhubungan dengan Laporan Akhir.
3. Instrumen
Instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan beserta alat pendukung seperti alat tulis, *handphone* dan laptop.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan di lingkungan instansi pemerintahan. Observasi ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada Ibu Yustikasari, S.H selaku kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat (KLM) dan beberapa staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Pertanyaan dalam wawancara ini merujuk pada proses

